

***Act East Policy: Analisis
Faktor Internal dan
Eksternal India dalam
Mengeluarkan Act East
Policy terhadap Korea
Selatan (2014-2019)***

Frequency of International Relations
September, Vol 2 (2) 142-164
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track :
Submitted : February 7, 2021
Accepted : February 8, 2021
Available On-line : February 28, 2021

Ni Putu Dyana Prabhandhari

Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jawa Timur
dyanaprabhandhari@gmail.com

Maria Indira Aryani

Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jawa Timur
maria_indira.hi@upnjatim.ac.id

Abstract

The Asian region is undergoing significant changes whilst facing the rise of China as a new power since Deng Xiaoping's leadership. The increasing power of China has caused unrest not only for countries in the Asian region but also for other Western countries, such as the United States. Increasing China's power has the potential to disrupt regional stability. One of the countries experiencing disruption to regional stability due to China's increasing power is India. In order to keep India from being affected by regional instability, India is promoting improved relations with its neighboring countries and identifying potential non-traditional partners by issuing the Act East Policy. Act East Policy, India seeks to improve relations with one of its potential trading partners, namely South Korea. This research is then aimed at analyzing the factors that led India to choose South Korea as the target of the Act East Policy in 2014 to 2019. This research will be analyzed using a qualitative explanative method and using a determinant thinking base of foreign policy and strategic environment. Based on the author's analysis, the factors that underlie India choosing South Korea can be divided into internal factors, namely the change of leaders in India and Indian economic conditions, and external factors, namely bilateral relations between the two countries.

Keywords: Act East Policy, Foreign Policy Determinants, Strategic Environment, India, South Korea

Pendahuluan

Kemunculan kekuatan baru seperti Cina yang mendominasi wilayah Asia menjadi pembabakan baru dalam geopolitik Asia (Paneerselvam, 2016). Berawal dari perkembangan ekonomi yang drastis akibat reformasi perekonomian Cina pada 1970an oleh Deng Xiaoping yang kemudian berkembang menjadi kekuatan politik di kawasan (Golley & Song, 2011). Perkembangan kekuatan Cina yang signifikan juga diikuti dengan usaha – usaha Cina untuk menjadi kekuatan utama dikawasan Asia–Pasifik. Salah satu dari upaya tersebut adalah dengan membangun kerjasama melalui inisiatif *One Belt One Road* (OBOR) dengan memberikan bantuan dana kepada negara–negara di Asia yang pada secara garis besar digunakan untuk membangun infrastruktur yang mempermudah perdagangan dengan Cina (Golley & Song, 2011).

Perkembangan Cina menjadi kekuatan baru dikawasan menimbulkan kecemasan bagi negara-negara dikawasan Asia serta Amerika Serikat yang selama beberapa dekade memiliki pengaruh yang kuat dikawasan Asia (Sutter, 2005). Kecemasan ini muncul disaat negara-negara dikawasan merasa tindakan Cina menjadi lebih agresif dan memiliki kecenderungan ekspansionis. Hal ini memicu ketegangan dikawasan karena permasalahan ini memicu Amerika Serikat untuk ikut menghadang kekuatan Cina di konflik Laut Cina

Selatan. Kemunculan kondisi geopolitik baru memberikan kesadaran bagi negara-negara di Asia untuk memperhatikan kebijakan luar negeri mereka. India sebagai salah satu negara *emerging power* yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang tinggi di Asia telah mengeluarkan kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk menjawab tantangan yang datang pada pembabakan geopolitik baru di Asia.

Menjamin agar pertumbuhan India tidak terganggu oleh ancaman-ancaman dari ketidakstabilan dikawasan mendorong India untuk harus berupaya menemukan pendekatan baru dengan mitra yang lebih potensial dan stabil. Dibawah kepemimpinan Modi, India mengedepankan perbaikan hubungan dengan negara-negara tetangganya serta mengidentifikasi mitra-mitra potensial non-tradisional. Salah satunya melalui inisiasi pembaharuan kebijakan *Look East Policy* menjadi *Act East Policy* yang memperluas jangkauan mitra serta bentuk hubungan yang akan dibangun oleh India terhadap negara-negara dalam kebijakan tersebut (Kesavan, 2020). Kebijakan ini didasarkan dengan prinsip 3C (*Culture, Commerce, Connectivity*) dengan tujuan untuk memperkuat konektivitas India terhadap wilayah Asia Tenggara dan memperluas integrasi ekonomi India dengan negara-negara di Asia Timur (European Foundation for South Asian Studies, 2020). Narendra Modi menitikberatkan hubungan ekonomi, strategis dan diplomatik terhadap negara-negara tujuan

tersebut atas dasar kepentingan yang sama yakni meningkatnya dominasi Cina dikawasan (Kesavan, 2020).

Salah satu negara tujuan yang menjadi mitra non-tradisional India dalam kebijakan ini adalah Korea Selatan. Korea Selatan dan India telah menjalin hubungan diplomatik yang didasari oleh kepentingan perdagangan yang kemudian berkembang menjadi hubungan strategis dengan ditandatanganinya *Strategic Partnership Agreement* pada 2010 yang menjadi titik penting bagi perkembangan hubungan substantif keduanya (Jhon, 2020). Seiring dengan perkembangan yang baik terhadap kerjasama tersebut Modi menjabat sebagai Perdana Menteri dan mulai menaruh Korea Selatan sebagai salah satu fokus dalam kebijakan luar negeri India melalui *Act East Policy* (Jhon, 2020). Kemudian pada 2015 Narendra Modi mengunjungi Korea dan menandatangani *Special Strategic Partnership Agreement* dengan Korea Selatan sebagai pembabakan baru dalam perkembangan hubungan India-Korea Selatan (Jhon, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan merupakan mitra penting bagi India dalam pembabakan baru dalam kebijakan luar negerinya.

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait kebijakan *Act East Policy* sebagian besar membahas tentang perubahan-perubahan yang dibawa oleh pembaharuan kebijakan tersebut yakni upaya memperkuat hubungan dengan mitra potensial untuk menjamin

keamanan regional khususnya akibat dari kemajuan Cina (Shiotani, 2019); (Fathullah, 2018); (Palit, 2016); (Mishra, 2018). Selain itu beberapa penelitian membahas tentang kesulitan-kesulitan yang dapat menghambat implementasi tujuan *Act East Policy* yang menekankan pada pengaruh India yang belum signifikan di beberapa wilayah regional seperti Semenanjung Korea serta kesulitan dalam meleburkan visi pemimpin dengan batasan-batasan birokrasi India (Dhawan, 2018); (Jhon, 2020); (Bhattacharya, 2018). Kemudian beberapa penelitian lainnya memfokuskan pada implikasi pembaharuan kebijakan *Act East Policy* terhadap hubungan India-ASEAN yang menekankan pada dimensi strategis yang akan dimiliki dalam hubungan bilateral tersebut (Palit, 2016); (Lee, 2015); (Sundararaman, 2017).

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas peneliti melihat kurangnya pembahasan yang dilakukan terhadap alasan India menetapkan negara-negara yang menjadi mitra potensial dalam kebijakana *Act East*. Pembahasan terkait hal tersebut dirasa perlu oleh penulis untuk melihat fenomena dibalik dipilihnya Korea Selatan sebagai salah satu mitra dalam kebijakan *Act East* India melalui faktor-faktor yang mendukung seperti kondisi politik dan ekonomi India serta dinamika hubungan India dan Korea Selatan. Berdasarkan pada pembaharuan terhadap Look East Policy menjadi Act East Policy

yang ditujukan tidak hanya kepada negara-negara ASEAN namun juga negara Semenanjung Korea, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah mengapa India mengeluarkan kebijakan *Act East Policy* terhadap Korea Selatan? Dalam menjawab pertanyaan yang muncul dalam tulisan ini penulis akan mencoba untuk melihat faktor internal dan eksternal yang menjadi alasan India mengeluarkan kebijakan *Act East* terhadap Korea Selatan.

Metode Penelitian

Kebijakan luar negeri merupakan upaya sebuah negara dalam mendapatkan kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri yang baik dapat membantu negara dalam mendapatkan kepentingan nasionalnya serta mendapatkan tempat yang sesuai dalam tatanan sistem internasional (diantara negara-negara lain) (AS., 2018). Kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai sikap negara terhadap negara lainnya maupun akibat dari interaksi yang terjadi diantara negara-negara tersebut. Terakait dengan sikap kebijakan luar negeri sebagai sebuah bentuk sikap negara, George Modelski berpendapat bahwa kebijakan luar negeri dapat menjadi sebuah metode yang dikembangkan untuk mengubah perilaku negara lain agar sesuai dengan kebutuhan nasional negara (Modelski, 1962). Kebijakan luar negeri dapat berupa sebuah perubahan atau kesinambungan

tergantung dengan kesesuaiannya dengan kepentingan nasional (AS., 2018).

Tahap-tahap dalam membentuk sebuah kebijakan luar negeri dapat terdiri dari tahapan yaitu negara harus memahami kondisi lingkungan internasional dan politik domestik; menentukan tujuan yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan internasional dan domestik; mengidentifikasi pilihan kebijakan yang dapat digunakan ; membuat kebijakan secara formal oleh badan pemerintah terkait ; implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan (Ahmed, 2019). Melihat dari tahapan tersebut maka dalam sebuah analisa kebijakan luar negeri para peneliti dapat melihat faktor-faktor determinan sebuah kebijakan luar negeri untuk melihat alasan dikeluarkannya kebijakan luar negeri oleh suatu negara.

Faktor determinan sebuah kebijakan luar negeri terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi dapat berupa sistem internasional, hukum internasional, organisasi internasional, hubungan dengan aktor lain (negara), dan perlombaan senjata dan yang lainnya tergantung pada situasi yang terjadi (AS., 2018). Sedangkan faktor internal yang dapat mempengaruhi adalah latar belakang sejarah dan budaya, kondisi geografis serta penduduk, kondisi ekonomi, kapabilitas militer, dan kondisi politik (Ahmed, 2019).

Strategic environment didefinisikan sebagai domain kepemimpinan berinteraksi dengan negara atau aktor lain dengan tujuan untuk mencapai sesuatu atau kesejahteraan. *Environment* dalam hal ini berupa hal internal dan eksternal, kondisi hubungan, tren, isu, ancaman, peluang, interaksi, dan dampak. dan dapat menjadi penentu sebuah upaya strategis sebuah negara. Karena *strategic environment* merupakan wilayah berinteraksinya negara maka *strategic environment* merupakan kondisi yang dinamis karena adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara yang mempengaruhi kondisi tersebut.

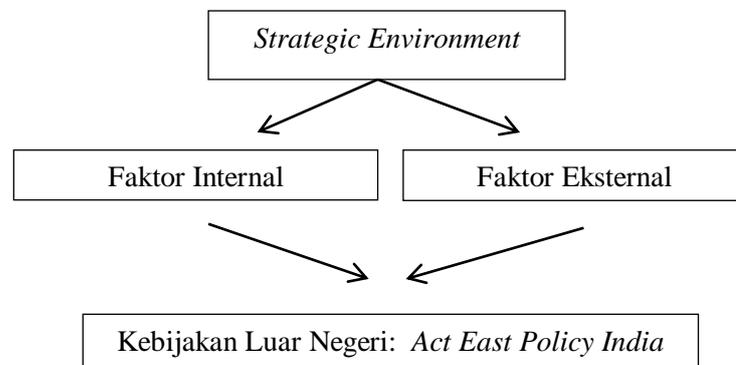
Teori *strategic environment* tidak secara spesifik menetapkan indikator atau penjelasan mengenai faktor internal dan eksternal secara lebih dalam maka dari itu penulis akan menjabarkan faktor internal dan eksternal sesuai dengan faktor determinan dalam sebuah kebijakan luar negeri yang akan diidentifikasi dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini. Faktor eksternal aktor merupakan negara-negara yang dapat terlibat dalam sebuah formulasi kebijakan luar negeri. Mengidentifikasi tujuan dan kekuatan dari aktor-aktor negara untuk mengetahui yang mana kawan dan yang mana bukan kawan (Yager, 2006). Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat interaksi yang dialami oleh negara pembuat kebijakan dengan negara-negara yang diidentifikasi sebagai kawan untuk menentukan peluang

yang dapat diambil melalui kebijakan luar negeri (AS., 2018). Sedangkan faktor sistem internasional berarti dinamika interaksi dan distribusi kekuatan diantara negara-negara yang ada. Sifat hubungan yang menjadi pola pada sistem internasional dapat menjadi penentu kebijakan suatu negara, misalnya adanya kecenderungan bekerjasama atau cenderung konfliktual (AS., 2018).

Faktor internal kondisi politik domestik dalam hal ini dapat berupa dengan adanya pergantian kepemimpinan yang mendorong sebuah kebijakan luar negeri dikeluarkan oleh negara. Peran pemimpin dapat dilihat dalam pembuatan kebijakan luar negeri khususnya terkait dengan analisa informasi yang kemudian digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Kemudian faktor internal lain adalah kondisi ekonomi dan perkembangannya yang dapat dievaluasi dalam menentukan langkah kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kapabilitas dan kondisi perekonomiannya (AS., 2018).

Sebuah kebijakan luar negeri dapat menjadi sebuah upaya strategis untuk mempengaruhi *strategic environment* dan melindungi kepentingan nasional negaranya. Dalam mengembangkan strategi untuk mengevaluasi *strategic environment* melalui sebuah kebijakan maka negara harus melihat faktor-faktor internal dan eksternal seperti disebutkan di atas (Yager, 2006). Faktor-faktor internal dan eksternal dalam hal ini adalah hal-hal yang dapat dievaluasi dalam

membantu negara untuk mengevaluasi *strategic environment* (Yager, 2006).



Gambar 1. Kerangka Berpikir *Strategic Environment*

Hasil

Faktor Internal: Pergantian Kepemimpinan dan Kondisi

Ekonomi India

Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dengan kewenangan eksekutif memiliki tanggung jawab untuk memimpin *Lok Shaba* (dewan perwakilan rakyat), menetapkan anggota kabinet dan menteri, serta memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang bersama anggota *Lok Shaba*. Perdana Menteri memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan kebijakan luar negeri dan memiliki tugas untuk menjadi delegasi negara dalam pertemuan tingkat tinggi. Hal ini menjadikan Perdana Menteri India sebagai aktor utama dalam menetapkan kebijakan luar negeri dengan peran yang dominan (India Government, n.d.). Peran Perdana Menteri yang dominan dalam pembuatan kebijakan luar negeri India dapat dilihat semenjak masa

jabatan Nehru pada masa awal kemerdekaan India yang membentuk citra India melalui kebijakan luar negeri (Ministry of External Affairs of India, 2018).

Pada tahun 2014 India melakukan pemilihan umum dan menetapkan Narendra Modi sebagai Perdana Menteri untuk periode 2014-2019. Narendra Modi memenangkan posisi tersebut dibawah Partai *Bharatiya Janata*. Melalui kemenangan tersebut Narendra Modi menyatakan visi dan misi dalam kepemimpinannya untuk memfokuskan pada pertumbuhan perekonomian yang berorientasi pada pasar, upaya membangun relasi dengan mitra-mitra dikawasan, dan memperkuat relasi dengan mitra-mitra potensial di wilayah Asia (The Economic Times, 2014). Seluruh tujuan tersebut merupakan upaya untuk mencapai pertumbuhan perekonomian dan menjamin kelancaran proses tersebut bagi India.

Narendra Modi memiliki tujuan untuk membangun infrastruktur India untuk kepentingan masyarakat dan produktifitas ekonomi. Agenda ini dituangkan dalam proyek *Smart Cities, Growth Corridors, Energy policy*. Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat membantu India untuk pemeratakan pembangunan dan menjamin konektivitas India terhadap seluruh wilayah-wilayahnya (India Today, 2018). Untuk mencapai hal tersebut Narendra Modi telah mengeluarkan kebijakan luar negeri *Act East Policy* yang bertujuan

untuk memwadahi upaya-upaya perbaikan hubungan dengan mitra-mitra terdekat.

Untuk mencapai hal tersebut Narendra Modi membutuhkan bantuan dana asing melalui investasi asing, transfer teknologi, dan kerjasama ekonomi dalam bidang industri dan infrastruktur (India Today, 2018). Untuk itu Narendra Modi menargetkan perbaikan hubungan dengan negara-negara yang mampu membantu India seperti Korea Selatan. Pada 2015 Narendra Modi melakukan kunjungan ke Korea Selatan pada 2015 dan menaikkan status kerjasama *strategic partnership* menjadi *special strategic partnership*. Narendra Modi menyatakan bahwa Korea Selatan merupakan mitra penting dalam perkembangan ekonomi India dan mitra vital dalam kebijakan *Act East Policy* (Ministry of External Affairs, 2015).

Dalam kunjungan Narendra Modi ke Korea Selatan pada 2015 dalam *India-Republic of Korea CEOs Forum* Modi menyatakan bahwa potensi kerjasama industri-industri India dan Korea Selatan dapat memberikan dampak luar biasa bagi perkembangan keduanya. Modi mendorong agar pelaku bisnis Korea Selatan untuk turut adil dalam proyek pengembangan India "*Make India*" seperti *India Smart Cities, Growth Corridors, Digital India* (India Today, 2018). Korea Selatan sebagai negara dengan keunggulan ekonomi dilihat menjadi mitra yang strategis bagi agenda pembangunan India dibawah Narendra

Modi yang mendorong Modi untuk meningkatkan dimensi hubungan India-Korea Selatan melalui kebijakan luar negeri *Act East Policy*.

Peran Narendra Modi dalam agenda peningkatan hubungan India-Korea Selatan dapat diidentifikasi semenjak masa jabatan Narendra Modi menjadi Wakil Menteri Gujarat pada 2001 (Maini, 2015). Hal ini dibuktikan pada pidato Narendra Modi pada *Investor Summit* di Dehradun di tahun 2018 yang menyatakan bahwa Narendra Modi ingin menjadikan Gujarat seperti Korea Selatan (Business Standard, 2018). Narendra Modi menyatakan bahwa terdapat beberapa kemiripan yang dimiliki oleh Korea Selatan dengan Gujarat seperti ukuran dan jumlah populasi. Akibat kemiripan tersebut, Narendra Modi mengaggumi pencapaian ekonomi yang telah dialami oleh Korea Selatan dan bertekad untuk membuat Gujarat mengalami pertumbuhan serupa dengan mencontoh Korea Selatan.

Hal ini dapat terlihat dari usaha-usaha yang dilakukan Modi dalam meningkatkan hubungan India dan Korea Selatan. Pada 2007 Narendra Modi mengirimkan delegasi pelaku industri dan bisnis India ke Korea Selatan untuk menarik minat investor Korea Selatan terhadap bisnis India (Kesavan, 2015). Kemudian pada November 2014 dalam kunjungan *East Asia Summit* di Myanmar Narendra Modi memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan Presiden Park Geun Hye terkait dengan prospek peningkatan peningkatan hubungan

bilateral keduanya (Kesavan, 2015). Hal ini kemudian dilanjutkan dengan kunjungan tiga negara pada 2015 oleh Modi sebagai kunjungan luar negeri pertamanya yang menyertakan Korea Selatan sebagai salah satu negara yang akan dikunjungi. Hal ini menandakan keseriusan Narendra Modi dalam menjangkau Korea Selatan.

Faktor Eksternal: Dinamika Hubungan Bilateral India-Korea Selatan

Korea Selatan dan India selama ini memiliki hubungan diplomatik yang harmonis dilihat dari tidak adanya sejarah konflik diantara keduanya. Penetapan hubungan diplomatik dilakukan pada 1973 (Ministry of External Affairs of India, 2020). Pasca formalisasi hubungan diplomatik pada 1973 hubungan India-Korea Selatan berkembang secara perlahan dengan dilakukannya interaksi tingkat tinggi oleh masing-masing pihak (Sahoo, et al., 2009). Hubungan keduanya sebagian besar didasari oleh kepentingan perekonomian khususnya semenjak diberlakukannya reformasi perekonomian India pada 1990. Hal ini dilihat sebagai peluang baik bagi pelaku bisnis Korea Selatan yang melakukan perluasan pasar ke India pada saat itu. (Ministry of External Affairs of India, 2017) Produk-produk Korea Selatan berhasil menembus pasar India dan melakukan investasi asing melalui pembangunan pabrik-pabrik perusahaan LG, Hyundai, Samsung di India. (Bajpae, 2014) Hal ini membawa keuntungan bagi

perkembangan perekonomian keduanya serta dengan semakin meningkatnya volume perdagangan diantara keduanya menyadarkan India dan Korea Selatan akan potensi hubungan bilateral diantara India-Korea Selatan.

Semenjak 2006 India memiliki upaya untuk memperdalam hubungan dengan Korea Selatan yaitu dengan dilakukannya kunjungan tingkat tinggi oleh Presiden Dr. APJ Abdul Kalam yang menghasilkan kerjasama *Comperhensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) pada 2009. Kemudian untuk pertama kalinya pada 2007 Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Jang-su mengunjungi India yang menjadi upaya untuk memperdalam dimensi kerjasama keamanan India-Korea Selatan. Kemudian pada 2010 Presiden Lee MyunG-bak mengunjungi India untuk penandatanganan peningkatan kerjasama menjadi *Strategic Partnership* yang menjadi titik penting bagi perkembangan hubungan substantif keduanya. (Jhon, 2020) Perkembangan hubungan menjadi *Strategic Partnership* menunjukkan adanya pandangan terhadap potensi kerjasama yang lebih dalam bagi India dan Korea Selatan.

Diskusi dan Analisis

India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan GDP mencapai 2.94 triliun dolar pada 2019 (The World Bank , 2020). Angka tersebut merupakan peringkat

ketujuh diantara negara-negara di dunia. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan perekonomian yang tinggi selama dua dekade terakhir. Hal ini merupakan hasil dari penataan kembali perekonomian pada 1991 melalui pendekatan liberalisasi pasar. Dimulai dari meliberalisasi pasar domestic kemudian berkembang kepada peningkatan kapabilitas bersaing terhadap pasar global. Melalui peningkatan ekspor, penurunan tarif dagang serta kerjasama perdagangan internasional upaya pembangunan perekonomian dilakukan oleh India.

Pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh India sejak dilakukannya reformasi ekonomi adalah meningkatnya pertumbuhan perekonomian India dengan tidak berkurangnya cadangan devisa India seperti pada 1980an. Pertumbuhan perekonomian India menjadi lebih menunjukkan peningkatan di sektor industri dan jasa dan menurun pada sektor agrikultur secara stabil hingga tahun 2000 dengan angka 7,3% dan 9% pada 2004-2008. Namun perkembangannya sempat terganggu akibat krisis finansial pada tahun 2008 dan menurun hingga 7,3 % (The World Bank , 2020).

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, India berupaya untuk mengembangkan pembangunannya melalui *10th Five Year Plan* (2003-2007). Melalui rancangan tersebut India berupaya untuk memangkas kemiskinan, membangun infrastruktur,

pendekatan fiskal yang lebih disiplin, dan efisiensi manufaktur (Pattnayak, 2007). Dalam realisasinya India memfokuskan untuk membangun pelabuhan, rel kereta api, regulasi baru untuk industri maskapai demi menjamin infrastruktur modern demi perkembangan perekonomian India (Pattnayak, 2007).

Perkembangan sumber daya manusia (SDM) India juga mengalami fenomena yang baik karena SDM India semakin berkembang dengan dicetaknya SDM yang memiliki pengetahuan terhadap ilmu terapan khususnya yang berkompeten dalam bidang pengembangan teknologi. India mengalami peningkatan SDM yang berkompeten dengan tingkat Pendidikan yang tinggi dalam bidang teknik, matematika, *programming*, dan sains (Pattnayak, 2007). Hal ini menempatkan India pada posisi strategis dalam pengembangan industrinya khususnya dalam teknologi pengembangan produk, industri komunikasi dan teknologi, industri energi, dan jasa sehingga membantu peningkatan daya saing industri India.

Dengan terpilihnya Narendra Modi pada 2014 membawa India dalam tujuan untuk menjadi kekuatan ekonomi dikawasan serta mengintegrasikan perekonomian dalam rantai global (World Politics Review, 2018). Dimulai dengan memudahkan akses perdagangan dengan India dan negara-negara dikawasan Asia Selatan, Narendra Modi memfokuskan pada pengembangan infrastruktur dan menjamin

keamanan kawasan khususnya dalam dimensi geopolitik. Dibawah *The Modi Doctrine* India menargetkan Korea Selatan dalam upaya pembangunan infrastruktur seperti rel kereta api dan konstruksi kapal laut (Chaulia, 2016). Faktor dana dan teknologi dalam membangun infrastruktur yang bermutu menjadikan Korea Selatan sebagai pilihan terbaik India.

Seiring dengan perkembangan yang baik terhadap kerjasama tersebut Modi menjabat sebagai Perdana Menteri pada 2014 dan mulai menaruh Korea Selatan sebagai salah satu fokus dalam kebijakan luar negeri India melalui *Act East Policy*. Kemudian pada 2015 Narendra Modi mengunjungi Korea dan menandatangani *Special Strategic Partnership Agreement* dengan Korea Selatan sebagai pembabakan baru dalam perkembangan hubungan India-Korea Selatan (Jhon, 2020). Selain itu, pandangan dan upaya Narendra Modi selaras dengan visi yang dimiliki oleh Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan luar negeri New Southern Policy yang memfokuskan untuk melakukan perluasan hubungan dengan negara-negara ASEAN dan India. (Dhawan, 2020) Kepentingan-kepentingan serupa yang dimiliki oleh India dan Korea Selatan menyadarkan keduanya akan dibutuhkannya upaya peningkatan hubungan strategis India-Korea Selatan yang memunculkan kebijaka

Act East Policy dari India serta *New Southern Policy* oleh Korea Selatan.

Kesimpulan

Act East Policy merupakan upaya yang dilakukan oleh India untuk membantu optimalisasi hubungan dengan mitra-mitra strategis. Sebagai negara yang memiliki potensi kerjasama yang baik bagi India, Korea Selatan menjadi salah satu negara tujuan dari kebijakan *Act East* oleh India. Beberapa faktor yang menjadi alasan India memilih Korea Selatan sebagai mitra di dalam *Act East Policy* dapat dilandasi oleh faktor internal dan eksternal India. Kondisi internal yang mempengaruhi keluarnya kebijakan ini adalah karena terjadinya pergantian kepemimpinan, perkembangan perekonomian yang tinggi serta upaya modernisasi India yang membutuhkan mitra negara maju dengan model perkembangan yang baik. Korea Selatan menjadi mitra yang tepat bagi India dalam membentuk model perkembangan India dengan kemajuan teknologi Korea Selatan yang dapat diterapkan dalam perkembangan sumber daya manusia India yang kompeten dikawasan. Kondisi ini didukung pula oleh kondisi eksternal hubungan bilateral antara India dan Korea Selatan yang semakin membaik seiring dengan kesamaan visi dan misi dan juga potensi yang dimiliki oleh kedua negara. Kondisi eksternal yang mempengaruhi adalah dinamika kerjasama ekonomi dengan mitra

potensial yakni Korea Selatan yang semakin memiliki dimensi strategis. Melihat hal ini, Narendra Modi meningkatkan status hubungan dengan Korea Selatan. Hubungan antara India dan Korea Selatan yang semula adalah *strategic partnership* kemudian ditingkatkan menjadi *special strategic partnership*.

Daftar Pustaka

- Ahmed, J., 2019. The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relations - An Analyses. *Journal of Critical Reviews*, 7(2), p. 789.
- AS., B., 2018. The Study of Foreign Policy in International Relations. *Journal of Political Sciences and Public Affairs*, 6(4).
- Bajpae, C., 2014. India-South Korea Relations and the Emerging Regional Architecture. *Strategic Analysis*, 38(4), pp. 437-443.
- Bale, R., 2016. *One of the World's Biggest Fisheries is on the Verge of Collapse*. [Online] Available at: <https://news.nationalgeographic.com/2016/08/wildlife-south-china-sea-overfishing-threatens-collapse> [Accessed 11 Nopember 2020].
- Bhattacharya, R., 2018. Insider ir an Outsider : Where is the Northeast in India's Act East Policy ?. In: S. A.. & C. S., eds. *Mainstreaming the Northeast in India's Look and Act East Policy*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Business Standard, 2018. *Wanted to make Gujarat like South Korea when I was CM: PM Modi*. [Online] Available at: https://www.business-standard.com/article/news-ani/wanted-to-make-gujarat-like-south-korea-when-i-was-cm-pm-modi-118100700399_1.html [Accessed 8 Desember 2020].
- Chaulia, S., 2016. *Modi Doctrine: The Foreign Policy of India's Prime Minister*. New Delhi : Bloombury .
- Dhawan, R. K., 2018. India's 'Act East' Policy Towards the Two Koreans : Issues and Challenges. *Strategic Analysis*, 42(5), pp. 490-502.

- Dhawan, R. K., 2020. Korea's 'New Southern Policy' Towards India: An Analysis. *Jadavpur Journal of International Relations* , pp. 1-20.
- European Foundation for South Asian Studies, 2020. *From Look East to Act East: India's Changing Pasture in the Indo-Pacific and the Containment of China*. [Online] Available at: <https://www.efsas.org/EFSAS-Study%20Paper-AEP-July-2020.pdf> [Accessed 11 Nopember 2020].
- Fathullah, M., 2018. Dari Look East Ke Act East: Arti Penting Perubahan Kebijakan Luar Negeri India terhadap Negara-negara di Asia Tenggara. *Jurnal Fisip*, pp. 1-26.
- Godwin, P. H., 2004. China as Regional Hegemon ?. *The Asia-Pacific: A Region in Transition*, pp. 81-101.
- Golley, J. & Song, L., 2011. China's Rise in a Changing World. In: *Rising China : Global Challenges and Opportunities* . Canberra: The Australian National University E Press.
- Haokip, T., 2011. India's Look East Policy : Its Evolution and Approach. *South Asian Survey* , 18(2), pp. 239-257.
- India Government, n.d. *The Constitution of India : Article 78*. [Online] Available at: https://www.india.gov.in/sites/upload_files/mpi/files/coi_contents.pdf [Accessed 7 Desember 2020].
- India Government, n.d. *Who's Who*. [Online] Available at: <https://www.india.gov.in/my-government/whos-who/president> [Accessed 7 Desember 2020].
- India Today, 2018. *4 years of Modi Sarkar: Report Card of Promises Kept*. [Online] Available at: <https://www.indiatoday.in/india/story/4-years-of-modi-sarkar-report-card-of-promises-kept-and-missed-1241499-2018-05-25> [Accessed 7 Desember 2020].
- Jhon, J. V., 2020. India-South Korea Relations Under 'Special Strategic Partnership: 'Act East Policy' Meets 'New Southern Policy'. *India Quaterly : A Journal of International Affairs*, 76(2), pp. 207 - 225.
- Johnston, M., 2014. Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries*, pp. 619-626.

- Kesavan, K., 2015. *South Korea and Modi's Act East Policy*. [Online] Available at: <https://www.orfonline.org/research/south-korea-and-modis-act-east-policy/> [Accessed 8 Desember 2020].
- Kesavan, K. V., 2020. *India's 'Act East' Policy and Regional Cooperation*. [Online] Available at: <https://www.orfonline.org/expert-speak/indias-act-east-policy-and-regional-cooperation-61375/> [Accessed 21 Oktober 2020].
- Klotz, A. & Prakash, D., 2008. *Qualitative Methods in International Relations : A Pluralist Guide*. USA: Palgrave Macmillan.
- Lamont, C., 2015. *Research Methods in International Relations*. s.l.:Sage Publication.
- Lee, L., 2015. India as a Nation of Consequence in Asia: The Potential and Limitations of India's 'Act East ' Policy. *The Journal of East Asian Affairs*, 29(2), pp. 67-104.
- Maini, T. S., 2015. *The Significance of Modi's South Korean Visit*. [Online] Available at: <https://thediplomat.com/2015/05/the-significance-of-modis-south-korea-visit/> [Accessed 2020 Desember 2020].
- Ministry of External Affairs of India, 2017. *India - Republic of Korea Bilateral Relations*. [Online] Available at: https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Republic_of_Korea_October_2017.pdf [Accessed 19 Desember 2020].
- Ministry of External Affairs of India, 2018. *Making India Foreign Policy*. [Online] Available at: <https://www.mea.gov.in/distinguished-lectures-detail.htm?764> [Accessed 7 Desember 2020].
- Ministry of External Affairs of India, 2020. *India - Republic of Korea Bilateral Relations*. [Online] Available at: http://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Bilateral_Brief_Jan_2020.pdf [Accessed 14 Desember 2020].
- Ministry of External Affairs, 2015. *Prime Minister's Statement at India-Republic of Korea CEOs Forum in Seoul*. [Online] Available at: https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/25266/Prime_Ministers_statement_at_India_Republic_of_Korea_CEOs_Forum_in_Seoul_May_19_2015 [Accessed 7 Desember 2020].

- Mishra, R., 2018. From Look East to Act East: Transitions in India's Eastward Engagement. In: G. Rozman & J. Liow, eds. *Asian-Palgrave Macmillan Series*. Singapore: Springer, pp. 321-340 .
- Modelski, G., 1962. *A Theory of Foreign Policy*. s.l.:Princeton University .
- Palit, A., 2016. India's Act East Policy and Implications for Southeast Asia. *Southeast Asian Affairs*, pp. 81-92.
- Paneerselvam, P., 2016. *Advancing India's Relationship with Japan and South Korea : Quest for Middle Power Cooperation*. [Online] Available at: http://www.ipcs.org/issue_select.php?recNo=603 [Accessed 11 Nopember 2020].
- Pattnayak, S. R., 2007. India as an Emerging Power. *India Quaterly : A Journal of International Affairs*, 63(1), pp. 79-110.
- Rajendram, D., 2014. *India's New Asia-Pacific Strategy: Modi act East*. [Online] Available at: <https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/indias-new-asia-pacific-strategy-modi-acts-east.pdf> [Accessed 13 Oktober 2020].
- Robert, C., 2017. *The South China Sea: Beijing's Challenge to ASEAN and UNCLOS and the Necessity of a New Multi-Tiered Approach*. [Online] Available at: <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/wp307-the-south-china-sea-beijings-challenge-to-asean-and-unclos-and-the-necessity-of-a-new-multi-tiered-approach/#.X6viKsgzaM8> [Accessed 11 Nopember 2020].
- Sahoo, P., Rai, D. K. & Kumar, R., 2009. *India-Korea Trade and Investment Relations*. [Online] Available at: <http://www.icrier.org/pdf/WorkingPaper242.pdf> [Accessed 12 Desember 2020].
- Shiotani, M. S., 2019. India's Act East Policy : Japan and Mongolia. *International Culture*, pp. 35-46.
- Silalahi, U., 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sundararaman, S., 2017. India-ASEAN Relations: 'Act East' in the Indo-Pacific. *International Studies*, 54(1-4), pp. 62-81.
- Sutter, R. G., 2005. *China's Rise in Asia-Promises, Prospect, and Implications for the United States*. [Online] Available at: <https://apcss.org/Publications/Ocasional%20Papers/OPChinasRis>

e.pdf

[Accessed 11 Nopember 2020].

The Economic Times, 2014. *Elections 2014 Results: Narendra Modi wins Vadodara Lok Sabha seat by over 5.70 lakh votes*. [Online] Available at: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/elections-2014-results-narendra-modi-wins-vadodara-lok-sabha-seat-by-over-5-70-lakh-votes/articleshow/35210970.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst [Accessed 7 Desember 2020].

The World Bank , 2020. *The World Bank Data - India*. [Online] Available at: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=IN>. [Accessed 23 October 2020].

World Politics Review, 2018. *How Modi is Broadening the Range and Scope of India's 'Act East' Policy*. [Online] Available at: <https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/24861/how-modi-is-broadening-the-range-and-scope-of-india-s-act-east-policy> [Accessed 7 Desember 2020].

Yager, H. R., 2006. *Strategic Theory for The 21st Century*. United States: DIANE Publishing.

Yahuda, M., 2013. China's New Assertiveness in the South China Sea. *Journal of Contemporary China*, 22(81), pp. 446-459.

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini (Tulis deklarasi ini jika ana menggunakan bahasa Indonesia).

Biografi

Ni Putu Dyana Prabhandhari Program Studi Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jawa Timur.

Maria Indira Aryani Program Studi Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jawa Timur.